

REPRESENTASI DIASPORA *SERUMPUN* MELAYU DAN TIONGHOA ASIA TENGGARA DALAM MEDIA BARU

Zinggara Hidayat

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang – Kebon Jeruk Jakarta

z.hidayat@esaunggul.ac.id

Abstract

The study of people in Southeast Asia has its own uniqueness. Malay Serumpun ethnic and Chinese were dispersed naturally in the region now known as one of the rapidly growing area of the world today. People of Malays and Chinese in Southeast Asia allied initially migrated, and then the next generation was born and grew up in the region as their own home (original homeland). Community interacts, transacts, and expresses its existence directly and or through the media. The use of the Internet (new media) in a communication event has become part of their identity and lifestyle of the global community. These sites, blogs, and Facebook have become part of life where it seems diversity characteristics as the original. Moreover, for the young, personal blog sites and social networks now tend to be claimed as an integral part of life of the millennium generation. This paper attempt to capture the existence of Malay and Chinese diaspora as virtually, especially in Southeast Asia including of Indonesia, Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. Their existence is interpreted in the context of historical values, characteristic physical appearance, language, clothes, cooking (cuisine), non-physical characteristics that include the presence of both ethnic dynamics in socio-political contestation, Asian values and religiosity. Various official website of the government shows less dominant characteristics of the virtual representation of ethnic Malays and Chinese. But on the social sites that appear quite expressive representation, both characteristics of ethnic and other symbols. Views can not be separated from both race attractions between forces in the region. The tendency of the identity claim may still exist in some communities, but the representation of the dominant community has now emerged is a part of the global community, in terms of English usage, fashion, and universal values. The presence of two large clusters of races is the result of their struggle in the fight for equality, independence, social dynamics, politics, and culture from the colonial and postcolonial domination of power, and is now a global power.

Keywords: Southeast Asia Cultural Studies, Diaspora *Serumpun* Malay, Diaspora Tionghoa

Pendahuluan

Studi mengenai orang-orang di kawasan Asia Tenggara memiliki keunikan tersendiri. Hal ini terutama berkaitan dengan entitas *homogenous* seperti identitas budaya, termasuk bahasa. Etnis “serumpun” Melayu dan Tionghoa terdispersi secara natural di wilayah yang kini dikenal sebagai salah satu kawasan pertumbuhan pesat dunia. Barrell *et al* (2008) menyebut pertumbuhan rata-rata yang tinggi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dalam beberapa dasawarsa ini sebagai suatu keajaiban. Kawasan menarik Asia Tenggara dalam konteks kajian budaya dan komunikasi sangat penting ditelaah, terutama beberapa Negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam sebagai negeri Serumpun. Etnisitas Melayu dan Tionghoa di kawasan ini pada awalnya bermigrasi, lalu generasi berikutnya lahir dan tumbuh di kawasan itu sebagai rumah sendiri (*original homeland*).

Keberadaan komunitas Asia Tenggara yang identik dengan percampuran budaya anak

benua India dan Mainland China (dalam sejarahnya) menghasilkan suatu identitas tersendiri. Menelaah identitas dan proses interaksi dalam komunikasi itu peran Internet sebagai media baru memiliki signifikansi kuat dalam memahami budaya kontemporer. Boellstorff & Lindquist (2004) bahkan memandang kawasan yang istimewa ini karena kuatnya pertalian budaya dan emosi yang membentuk fenomena sosio-kultural dalam dinamika ‘intimasi’ versus ‘publik’ atau ‘bentukan’ versus ‘simbolis.’ Kedua pasang dikotomi ini adalah bagian dari dinamika kawasan.

Kecenderungan tumbuhnya budaya global di pelbagai belahan dunia mungkin mengaburkan identitas orisinal masyarakat Serumpun Melayu dan Tionghoa, akibatnya tumbuh suatu kerinduan pada kelompok-kelompok masyarakat. Komunitas berupaya mengumpulkan elemen-elemen identitas budaya dalam bentuk verbal, nonverbal, dan artifak agar identitas itu bias diekspresikan dengan mengisi ruang-ruang publik global.

Dalam konteks alih generasi pada beberapa dekade terakhir, posisi generasi muda berbeda dengan generasi tua. Eksistensi kaum muda di kawasan Asia Tenggara—juga di kawasan dunia lain—diperlihatkan secara ekspresif dalam media baru Internet. Salah satu alasan menarik untuk menelaah media baru, misalnya kemampuan produksi pesan yang luar biasa besarnya. Termasuk konten identitas kultural yang diperlukan dalam proses komunikasi dan diseminasi intra dan antarkomunitas (M.Z. Rozan & Y. Mikami, 2007).

Representasi atau potret diaspora *Serumpun Melayu dan Tionghoa* di dunia maya adalah kajian budaya di tengah perkembangan media baru sebagai identitas sosial. Media virtual kini sedang mengusung suatu bentuk budaya global dengan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi, gaya hidup serta selera yang serba sama tanpa sekat waktu dan ruang. Karena itu, pemanfaatan Internet bagi upaya memajukan pembangunan budaya dan sekaligus dinamika kritikal di dalamnya, perlu dibahas dengan memahami latar historikal, kekuatan (*power*), jarak kekuasaan, dan disparitas lain yang mengendalikannya. A. Heryanto (2003) menyebutkan tiga hal dalam kajian budaya yang perlu dicermati, yakni soal kekerasan (*violence*) politik dan komunal, politik yang berbasis agama, dan masalah kontemporer gema budaya populer.

Konten yang berkaitan dengan budaya dalam situs-situs institusi, *blog*, dan jejaring sosial Facebook perlu dipahami secara mikro untuk melihat ekspresi interaksi komunikasi lintas generasi. Pada satu sisi media baru cenderung merapatkan dan menyeragamkan komunitas dari pelbagai belahan. Konten virtual dipahami sebagai bagian dari representasi identitas budaya sekaligus merupakan upaya pelestarian komunitas sosial dan pengembangan *social-networks*. Telaah ini menjadi satu area kajian penting dalam studi komunikasi dan sosial, sebagaimana pendapat J. Woodier (2008:8). Makalah ini berupaya memotret identitas budaya kelompok-kelompok komunitas yang terdispersi di kawasan Asia Tenggara. Fokusnya ditujukan pada identitas Melayu, Tionghoa, dan interaksi antar keduanya sebagai unsur-unsur pembentukan *nation state* di Malaysia, Indonesia, Singapore, dan Brunei Darussalam, serta bagaimana dinamika itu berjuang di balik virtual.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan wacana yang terbentuk atas konten verbal dan nonverbal. Analisis diskursus isi dilakukan terhadap beberapa situs pemerintah dan nonpemerintah, situs *blog* pribadi atau komunitas, dan jejaring sosial Facebook. Kriteria atau karakteristik elemen budaya yang dianalisis meliputi tampilan fisik, bahasa, pakaian, kuliner khas (*cuisine*), wacana dibalik virtual menyangkut identitas, sosio-politik, dan religiusitas. Data sekunder dalam hal ini adalah kajian pustaka dan dokumen *online* berupa konten visual dan verbal dalam situs yang diambil dengan penelusuran di mesin pencari google. Adapun sembilan situs yang menjadi unit analisis adalah situs: Melayu Indonesia, Tionghoa Indonesia, Melayu Malaysia, Tionghoa Malaysia, Facebook Melayu Singapore, blog Tionghoa Singapore, Melayu Brunei Darussalam, Tionghoa Brunei Darussalam, dan Facebook Melayu Serumpun Indonesia.

Eksplanasi Konsep

Etnisitas dan identitasnya. Batasan mengenai etnis selalu cair dan berbasiskan pada keragaman kriteria (Hirschman, 1987). Tanda-tanda fisik dan budaya digunakan untuk membedakan suatu populasi dari lainnya dapat menjadi ambigu, jika subyek itu mengalami perubahan silang pada generasi hilirnya. Tanda-tanda (*markers*) harus diperkuat dengan aransemen sosial dan praktik-praktik yang mengukuhkan identitas kelompok dan di antara kelompok lainnya. Sebagian dimensi yang meneguhkan etnisitas adalah karakteristik budaya seperti bahasa, pakaian (*dress*), dan makanan & minuman khas (*cuisine*). Pada beberapa kasus, keragaman ini dikaitkan dengan perbedaan warna kulit, tinggi badan (*stature*), atau aspek fisik lainnya namun biasanya lalu meluntur.

Ragam Definisi Budaya. Budaya didefinisikan dengan banyak sisi—dari suatu pola persepsi yang memengaruhi komunikasi hingga ke suatu kontestasi dan konflik. Karena banyak cara menerima definisi kultur, dan karena ia merupakan konsep yang kompleks, maka penting merefleksikan sentralitas kultur di dalam interaksi manusia. Menurut Wen-shu Lee *et al.* (1995:262-91), setidaknya ada enam definisi budaya, yakni: 1) upaya manusia yang unik—yang membedakannya dari telaah ilmu alam dan biologi; 2) perbaikan (*refinement*), tatacara (*mannerism*)—berkaitan dengan budaya tinggi yang memisahkan budaya populer;

3) sipilisasi—berkaitan dengan imperialistik dan kolonisasi; 4) berbagi-pakai (*sharing*) bahasa, keyakinan, nilai-nilai—berkenaan dengan “universalitas dan keterwakilan” suatu komunitas; 5) kultur yang dominan atau hegemoni—berkaitan dengan interaksi budaya yang dikuasai kelompok kuat, dan 6) pergantian penekanan antara yang di-*share* dan yang tidak—sebagai suatu meta-pandang (*metaview*) budaya. Karena itu, pemahaman budaya membutuhkan suatu identifikasi terhadap dimensi nilai-nilai yang bervariasi. Inilah keunikan kajian budaya yang melukiskan suatu mosaik indah dalam peta masyarakat di berbagai belahan bumi (Z. Hidayat, 2011).

Nilai Budaya. Nilai-nilai budaya merupakan suatu gagasan atau ide abstrak secara implisit atau eksplisit mengenai hal yang baik, benar, dan diinginkan dalam masyarakat (Williams, 1970; Shalom H. Schwartz (1999). Bahwa kebebasan, keamanan, kesejahteraan sebagai contoh nilai-budaya itu, telah menjadi dasar norma yang menuntun orang-orang melangkah tepat dalam berbagai situasi. Demikian juga cara-cara berbagai institusi sosial (seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, keagamaan) sesungguhnya refleksi nilai-nilai budaya.

Peran-peran itu dapat dilihat sebagai perilaku sosial yang dipilih untuk membenarkan pilihan perilaku terhadap orang lain. Sebagaimana dijelaskan Bourdieu (1972), Markus & Kitayama (1994), dan Shalom H. Schwartz (1999), bahwa nilai eksplisit dan implisit muncul sebagai ciri budaya anggota masyarakat melalui paparan atas kebiasaan sehari-hari dalam bentuk hukum, norma, naskah, dan praktik institusi.

Kajian Budaya dan Komunikasi. Perspektif komunikasi terhadap budaya dipahami melalui dua hal: Pertama, komunikasi itu sesungguhnya simbolik. Artinya, kata-kata dan bahasa tubuh (*gestures*) manusia tidak memiliki makna yang melekat, melainkan keberartian dari makna yang telah disepakati. Kedua, komunikasi itu sebagai proses. Di dalamnya terdapat suatu negosiasi pemaknaan yang terjadi secara dinamis. Komunikasi itu bukanlah suatu peristiwa tunggal melainkan terus terjadi (*ongoing*). Pesan-pesan yang terbentuk tidak diskrit dan linier namun berkesinambungan dengan batas-batas yang kabur antara awal dan akhir. Ketika kita menegosiasikan makna, kita juga mencipta, memelihara, memperbaiki, atau mentransformasikan realitas (Z. Hidayat, 2011). Begitu dekatnya kajian komunikasi

dengan budaya dan peran komunikasi dalam kebudayaan itu, sehingga muncul pernyataan klasik: “komunikasi itu adalah budaya, dan budaya itu adalah komunikasi”. Kajian budaya secara umum merupakan penelitian interdisipliner yang dapat diaplikasikan pada teks (visual dan verbal), potret masyarakat dan relasi gender. E.T. Hall dan M. Hall (1990:3) menyebutkan bahwa “culture is communication”.

Media Baru dan Jejaring Sosial. Struktur media baru dikenal dengan hypermedia adalah suatu konsepsi yang dekat dengan interaktivitas (*branching-type*)—karena elemen-elemen digunakan untuk membentuk suatu cabang-pohon. (L. Manovich, 2001:21-55) menyebut lima hal sebagai prinsip utama media baru, yaitu: representasi numerikal, modularitas, *automation*, variabilitas, dan *transcoding*. Dalam *hypermedia*, elemen-elemen multimedia dan strukturnya terhubung melalui suatu hyperlink. Dengan begitu setiap elemen dan strukturnya independen satu dengan lainnya—kebalikan bagi media tradisional. Selanjutnya, *the World Wide Web* adalah implementasi hypermedia di mana elemen-elemen terdistribusikan melalui jaringan (*the network*) dalam bentuk *hypertext* di mana para partisipan-komunikasi saling berinteraksi di dalamnya.

Kilas Sejarah Melayu dan Tionghoa di Asia Tenggara

Dunia Melayu seperti yang dipahami saat ini—secara terbatas merunut sebaran etnis ‘orisinalitasnya’—terdiri dari Semenanjung Malaysia, pantai timur Sumatera, pantai barat dan barat daya Kalimantan, dan kepulauan Riau. Orang-orang Melayu ‘asli’ itu secara tradisional menetap di pesisir pantai dan di daerah aliran sungai. Mereka hidup dari mengelola sumber daya alam pertanian, perikanan, perkebunan dan perdagangan. Istilah Melayu menjadi semakin meluas makna geografisnya. Orang-orang yang mendiami kawasan Asia Tenggara itu sebagai penduduk asli (*native*) atau komunitas yang pertama mendatangi tanah itu. Akhirnya kawasan Asia Tenggara kontemporer merupakan suatu kawasan yang sangat menarik karena memiliki beragam keunikan. Wilayah ini memperlihatkan pertemuan beragam identitas budaya baik asli Melayu, anak benua India, dan China *mainland* yang mencakup nilai-nilai, bahasa, dan tradisi hasil karya.

Kajian budaya harus merujuk kepada sisi historikal. Demikian juga untuk memahami dunia kemelayuan, harus merunut ragam perkembangan yang terjadi di kawasan. Ding C.M. (2009) menyebut bentuk tradisi budaya awal—bahkan jauh sebelum tradisi Hindu memasuki kawasan ini—sebagai fundamen identitas yang nantinya membentuk karakter orang Melayu. Kawasan ini mengawali suatu proses Indianisasi yang begitu panjang, perkiraan dari Tahun 100 hingga abad ke-13. Pada saat itu, laju perkembangan peradaban di dunia Melayu telah meluas terutama melalui intensitas perdagangan dengan negeri China, India dan Arab. Institusi kenegaraan memformalkan budaya itu dengan munculnya berbagai kesultanan Melayu. Kerajaan-kerajaan lokal ini yang saling berjuang untuk mengendalikan rakyat, tanah dan aktivitas perdagangan. Jauh sebelum Vasco de Gama melintas, simpul perdagangan dari Malaka ke Maluku telah menjelmakan pelabuhan-pelabuhan sibuk di Nusantara. Magnit inilah yang menarik bangsa Portugis untuk merebut Malaka pada 1511, yang selanjutnya mengakarkan kekuasaan bangsa-bangsa Eropa atas tanah Melayu dalam periode panjang hingga abad ke-20.

Istilah Melayu atau *Malay* ditujukan kepada suatu etnis atau bangsa sebagai komunitas utama yang merujuk identitas kolektif di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kata ‘Melayu’ pertama kali diperkenalkan oleh Munshi Abdullah, seorang guru bahasa Arab dan Tamil yang tinggal di Malaka (*The Straits settlements*) pada paruh pertama abad ke-18. Melayu adalah sebutan untuk orang-orang biasa (*common people*) sebagai pihak yang berhadapan dengan elite. Munshi menggunakan kata ini sebagai pengeritik pionir terhadap dominasi aristokrasi. Menurut Milner (1998:154) dalam Lian (2001:865), kata Melayu digunakan terkait adanya perhatian atas keberadaan penduduk asli di antara etnis lain. Penyebutan Melayu muncul akibat kekhawatiran persaingan, bahwa Melayu yang komunitasnya lebih besar itu mungkin “diatur” oleh ras-ras lain. Hingga abad ke-20 kelompok nonmelayu imigran semakin signifikan, karena British Malaya saat itu melibatkan etnis Chinese dan India bekerja di perkebunan karet dan tambang timah.

Kontribusi utama pembentukan istilah Melayu adalah dari pers. Misalnya, munculnya surat kabar *Utusan Melayu* (UM) yang dikelola Mohammed Uenos, sebagai surat kabar nasional pertama didistribusikan di Straits Settlements dan

Negeri-negeri Melayu (Turnbull, 1996:119 dalam Lian (2001:865) dan tumbuh menjadi harian terkemuka pada 1915. UM mengartikulasikan Kemelayuan dan membantu proses pematangan diskursus politik Melayu. UM fokus kepada Melayu sebagai ras atau bangsa dengan mengambil jarak tegas dari kesultanan saat itu. “Kerajaan penting bagi masyarakat Melayu,” tulisnya, namun para penguasa harus tunduk kepada konsep yang lebih penting dari monarki, yaitu suatu *bangsa* atau ras—dalam hal ini perlu pemahaman lokal mengenai gagasan “ras” tidak terkait dengan genetik-biologis sebagaimana ajaran Darwinisme. Terlebih lagi, UM memopulerkan gagasan teritori dengan mengacu pada kata ‘negeri’ (*state*), ‘watan’/’tanah air’ (*homeland*), dan lebih khusus ‘tanah Melayu’ (*Malay land*). Istilah yang terakhir ini diadopsi oleh para nasionalis Melayu, untuk menggugurkan sebutan kolonial Inggris, ‘Malaya’.

Perkembangan berikutnya, hingga 1930-an telah tumbuh kaum intelektual Melayu yang selanjutnya menjadi pionir dalam mengangkat harkat etnis dan bangsa. Apalagi semangat Melayu itu juga didorong kuat dari spiritualitas Islam. Studi Syed M. Naquib Al-Attas pada awal abad ke-15 menyebutkan bahwa masyarakat Melayu sangat dipengaruhi gerakan tasawuf intelektual dan rasionalistik (N.M. Nor, 2006). Inilah yang memengaruhi secara intelektualitas dunia Melayu yang belum ada pada masa pra-Islam.

Dispersi Melayu sesungguhnya menjadi bagian dari perkembangan pulau-pulau di Asia Tenggara. Pada awalnya, apa yang terjadi di Semenanjung dan kepulauan adalah bagian dari pertumbuhan etnis sebagaimana komunitas orang ‘Jawa’ yang lebih besar, ‘Bugis’ dan etnis kecil-kecil di kawasan timur Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, orang Jawa dan Melayu adalah bagian dari komunitas yang cair (bagian dari Kerajaan Majapahit) hingga dating kolonial yang membagi kawasan secara terpisah-pisah. Terjadilah pergeseran batas-batas etnis menjadi identitas *nation* dalam dalam pengertian *state* yang lebih kaku dan eksklusif. R. Tirtosudarmo (2005) melihat pendefinisian kemelayuan itu secara sadar dimanipulasi oleh para elite untuk merumuskan negara dan ideologinya (kepentingan kekuasaan). Sementara, hal yang sama, orang Jawa sebagai kelompok mayoritas terus bergerak memimpin menuju suatu definisi kemelayuan yang diarahkan kepada pembentukan transnasionalisme etnis-sipil Indonesia.

Peran komunitas Melayu dalam perdagangan di kawasan sangat penting. K.W. Taylor (1992:173-4) mencatat bahwa armada kapal perdagangan yang membawa produk-produk lokal begitu padat melayani perdagangan regional dan internasional. Misalnya kerajaan Sriwijaya di Sumatra pada abad ke-7 yang kemajuannya tak terlepas dari asal-usul sebagai kerajaan Melayu. Pada abad ke-13, pengaruh Melayu berkurang begitu muncul kerajaan Jawa Majapahit. Baru pada abad berikutnya tumbuh lagi, ketika seorang pangeran Melayu Melaka mendirikan kesultanan. Interaksi dengan bangsa lain semakin kuat, termasuk China yang turut mengelola jalur perdagangan di pelabuhan Melayu di sisi sepanjang Selat Melaka.

Selanjutnya pada abad ke-15, para penguasa Melaka mengadopsi Islam. Taylor (1992:176) mengamati bersinarnya kembali kekuasaan menandai awal sejarah Melayu berikutnya seperti masa keemasan beberapa abad sebelumnya. Namun paparan historis ini tak terlepas dari hasil interpretasi hubungan kekuasaan British-Melayu. Sebab menurut Shamsul A.B. (2001), sembari mengutip pendapat Cheah B.K., kemelayuan yang diperdebatkan itu sarat dengan kandungan konstruksi historis orientalis-kolonial, misalnya tercermin dalam sebutan 'Malaya', lalu 'Malaysia' adalah sebutan kolonial Inggris.

Dalam konteks historikal itu, Parnickel (1979) misalnya, menjelaskan bahwa faktor lain yang mempercepat dan memperkuat pembentukan bangsa Melayu pada 1957, yakni setelah penggabungan beberapa teritori pada 1963 yang disebut Federation of Malaya. Proses penyatuan ini selalu mengomunikasikan adanya masalah hubungan antara penduduk asli dari negara yang baru lahir yakni Melayu (46,8 persen) dan imigran yang menetap terutama pada akhir abad ke-20, yakni Chinese (34,1 persen), dan etnis India 9 persen. Dinamika hubungan antaretnis ini terus menjadi perhatian terutama antara Melayu dan Chinese, sebagai akibat pembentukan negara Singapura pada 1965 dan bentrokan berdarah di Kuala Lumpur pada 13 Mei 1969.

Secara historis etnis Tionghoa Asia Tenggara adalah ras perantauan yang mendatangi kawasan ini dalam beberapa tahap. Menurut L. Suryadinata (2001:55), mereka menyebut perantauan (*overseas*) karena para pionirnya suatu saat akan melakukan perjalanan pulang kampung (*homeland*) dan itu terjadi hingga 1945. Ketika

terjadi perubahan akibat Perang Dunia II dan transisi kemerdekaan dan transformasi di berbagai kawasan, termasuk di *mainland* China. Mayoritas warga Tionghoa Asia Tenggara memang lahir dan besar di wilayah ini. Dalam istilah Chinese, mereka adalah *Huaren* (*Chinese people* atau *ethnic Chinese*) atau *Huayi* (keturunan), dan bukan *Huaqiao* (sebagai pendatang di luar negeri atau *Chinese sojourners*).

Populasi Tionghoa di Asia Tenggara disebut sebagai Peranakan atau Baba Chinese, telah menjelma sebagai generasi baru dengan identitas masing-masing bangsa, Malaysian-Chinese, Tionghoa Indonesia, Singaporean, dan Chinese of Brunei. Clammer (2002) mencatat bahwa dalam perkembangannya interaksi antar etnis di Asia Tenggara sebagian sudah melebur, misalnya budaya-budaya Melayu juga sudah diadopsi dalam bahasa, pakaian, dan kuliner. Demikian juga sebaliknya. Suryadinata (2001:56) memperkirakan pada 1999 sejumlah 23 juta etnis Chinese di Asia Tenggara, yakni 80 persen dari seluruh etnis yang tinggal di luar negeri China. Berdasarkan total penduduk nasional, Singapura tertinggi (77 persen), Malaysia (25 persen), dan Brunei (16 persen). Namun dalam angka absolute, Indonesia terbesar populasi etnis Tionghoa, yakni 6,3 juta, diikuti Malaysia (5,5 juta), dan Thailand (5,2 juta).

Representasi Melayu Dan Tionghoa Dalam Media Baru

Beberapa situs, blog, dan Facebook yang dijadikan unit analisis adalah situs Melayu Indonesia, situs Tionghoa Indonesia, situs Melayu Malaysia, blog Tionghoa Malaysia, Facebook Melayu Singapore, situs Melayu Brunei Darussalam, situs Tionghoa Brunei Darussalam, situs blog Tionghoa Singapore, dan Facebook Persatuan Melayu Serumpun (lihat lampiran).

Situs Melayu Indonesia. Representasi identitas Melayu pada situs "Raja Ali Haji" memperlihatkan dimensi sejarah Melayu yang kental. Visual yang menonjol adalah gambar lukisan separuh badan Yang Di-pertuan sultan Riau-Lingga, Raja Ali Haji, dengan latar pemandangan horizontal sebuah kota pelabuhan tua dari laut ke arah pantai. Nun jauh terlihat bangunan rumah adat dan menara mesjid, dan pada sisi kanan situs terdapat logo-embos kerajaan bintang delapan sudut bertuliskan arab, dan dengan slogan erbahasa Inggris: *The Living Malay*

Wisdom. Konten situs mengenai identitas kemelayuan cukup lengkap seperti sejarah, sastra, kuliner, pakaian adat, dokumen dan artifak lainnya. Selain situs ini, juga dieksplorasi Facebook Persatuan Melayu Serumpun, dengan deskripsi antara lain, “Kesultanan Johor disebut juga sebagai Johor-Riau atau Johor-Riau-Lingga, kerajaan yang berdiri pada 1528 oleh Sultan Alauddin Riayat Syah, putra sultan terakhir Malaka, Mahmud Syah.”

Situs Tionghoa Indonesia. Pada situs ini representasi etnis Tionghoa cukup ekspresif dengan visual utama barongsai yang tengah beraksi. Situs ini lebih sebagai dokumentasi atas beragam berita dari pelbagai media mengenai orang-orang atau tokoh Tionghoa di Indonesia, seperti seniman, selebriti, pejabat pemerintah, ilmuwan, dan sebagainya. Situs juga menyediakan dokumentasi audio-video sebagai TV Tionghoa. Visual website dengan warna merah yang dominan memperlihatkan kekuatan karakter etnis selain kuning emas. Dalam beberapa naskah komentar dan berita tersirat pesan kebanggaan bahwa kini etnis Tionghoa di Indonesia memiliki tokoh-tokoh yang duduk di pemerintahan sebagai Menteri dan para selebriti yang juga mendominasi di berbagai program televisi, film, teater, dan dunia hiburan lainnya.

Situs Melayu Malaysia. Pada situs ini diambil sebuah website yang bernama Jaringan Melayu Malaysia (JMM) yang visual berandanya memperlihatkan sebuah kliping dokumentasi foto sejarah hitam putih dengan busana khas Melayu. Situs ini selain mendokumentasikan berita-berita tokoh Melayu, juga menampilkan opini pengelola dan audiens. Ada dua jenis penampilan para tokoh Melayu, pertama para tokoh politik dan pemerintahan berbusana ala Barat lengkap dengan stelan jas, dan tokoh-tokoh ulama dan adat berbusana Muslim, penutup kepala surban putih dililit tapi telinga terlihat bagi kaum lelaki, dan mengenakan jilbab bagi perempuan. Konten dokumentasi kontemporer memperlihatkan adanya perdebatan public mengenai kebebasan, dan kehidupan ala Barat di satu sisi dan pada sisi lain memperlihatkan semacam “kemarahan” tokoh tua (ulama) Melayu terhadap perilaku itu.

Situs Tionghoa Malaysia. Situs yang diambil adalah situs resmi Malaysian Chinese Association (MCA) dengan visual foto Presiden MCA Dr. Chua Soi Lek dalam busana lengkap ala Barat. Selain lambing komunitas juga nama

asosiasi dalam huruf china yang memberikan makna kuat terhadap Chinese *heritage*. Konten utama yang dipesankan adalah sebuah perdebatan dan perlawanan kaum Tionghoa Malaysia dalam bidang sosial politik terhadap kekuasaan Negara—sikap oposisi terhadap pemerintah. Selain itu identitas etnis memperlihatkan ketekunan komunitas dalam bidang pendidikan dan pelatihan dan beragam persoalan sosial budaya lainnya.

Situs Tionghoa Singapore. Representasi virtual dalam hal ini diambil satu blog pribadi warga Singapore bernama Ong Tee Keat. Visual blog memperlihatkan figur Ong berada di tengah-tengah sekumpulan anak-anak dari beragam etnis: Chinese, Melayu, India. Ong yang berbusana kemeja putih dan mengenakan dasi nampak senyum lebar di tengah anak-anak yang ceria melambaikan tangan. Ada satu kutipan dokumentasi berita dengan pernyataan tertera dengan makna yang sangat kuat, “Saya membuat ini demi untuk tegakkan keadilan” (*Free Malaysia Today*), selain sekumpulan kliping berita dengan issue sosial-politik Tionghoa. Selain itu album foto dengan keterangan berbahasa Mandari yang memperlihatkan identitas kuat.

Situs Melayu Singapura. Representasi virtual dalam hal ini diambil sebuah situs bernama “Melayu Singapore”, dengan identitas visual gambar bendera kebangsaan nasional Singapura. Dalam “Info” diberi penjelasan sedikit bukan dalam bahasa Melayu, namun “Gather all the Malays in Singapore to join this group. So that we can share our interest and even plan our own outings and meet-ups.” Sedikitnya jumlah anggota mungkin memperlihatkan posisi minoritas Melayu di Singapura, yakni hanya 39 orang, namun FB ini masih aktif dengan munculnya komentar dan tanggapan dalam dinding (“walls”) dari beberapa anggota.

Situs Melayu Brunei Darussalam. Inilah situs remi “Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam”. Dalam visual beranda tertera logo kerajaan dan tulisan huruf Arab-Melayu diikuti bahasa Melayu, namun pada bagian atas sebelum tulisan Arab-Melayu, terdapat *head* “The Prime Minister’s Office of Brunei Darussalam”. Selain itu, sebuah slogan pemerintahan dengan pesan yang kuat tertulis: “Kepemimpinan yang Cemerlang serta Kepemerintahan yang Baik ke arah Kestabilan dan Kemakmuran Nasional”. Kontennya menampilkan foto-foto kegiatan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (dalam

busana lengkap ala Barat) sedang menerima kunjungan berbagai tamu Negara. Visual lain memperlihatkan kegiatan kenegaraan namun kepala Negara dalam busana Melayu yang khas dilengkapi peci hitam. Ada satu pesan yang kuat pada halaman beranda seperti “Pelihara profesionalisme, integriti, kredibiliti.”

Situs Tionghoa Brunei Darussalam.

Ada satu media nasional Brunei yang halaman depannya menampilkan suatu kegiatan perayaan tahun baru Imlek dengan visual dan verbal yang sangat kuat. Situsnyanya adalah The Brunei Times, dengan head “Kingdom of Brunei in Ancient Chinese Records,” menunjukkan bahwa harian berbahasa Inggris ini mengisahkan etnis Tionghoa tak terlepas dari sejarah Brunei, di mana Kerajaan Brunei telah menjalin hubungan dengan China sejak abad ke-4.

Diskursus Diaspora Melayu Dan Tionghoa

Bahasan ini mendalami apa yang terjadi jauh melintasi bentangan waktu secara historis berkaitan dengan tanda, simbol, dan makna yang diekspresikan secara virtual. Bahwa representasi di media baru itu adalah bagian dari realitas masyarakat di kawasan. Oleh karena itu, pertama, memahami identitas budaya Asia tentu saja berbeda dengan pandangan Barat yang mengedepankan nilai-nilai individu yang independen. Kebanyakan budaya Asia identik dengan interdependensi, kebergantungan satu dengan lainnya atau budaya kolektif. Orang-orang Asia belajar untuk saling-bergantung pada orang lain, mengejar pencapaian, untuk masuk dan berarti di dalam kelompok. Selanjutnya, identitas itu berkaitan dengan suatu nilai-nilai yang dipelihara.

Realitas karakter nilai-nilai Asia

Identitas dapat dikenali secara fisik, misalnya warna kulit, tinggi badan, mata, rambut dan sebagainya. Namun identitas ini bisa memudar karena terjadi asimilasi antaretnis, meskipun elemen lain seperti busana dan jenis makanan (kuliner) atau *cuisine* terus eksis. Identitas nonfisik berkembang dan dipelihara secara meluas di antara komunitas Asia misalnya sebagai sebuah identitas baru. M.R. Thompson (2001) menyebut suatu identitas khusus seperti *Asian Values* atau “Asian Way” sebagai dikotomi dengan Barat untuk menggambarkan fenomena perkembangan sosio-ekonomi dan budaya Timur, yang kini bertumbuh sebagai satu pusat kekuatan. *Asian*

values ditemukan di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan negara-negara di sekitar kawasan dengan standar kesejahteraan relatif baik. Meski kemakmuran terus dipelihara dan ditingkatkan namun pemerintah di negara-negara itu berargumen bahwa budaya demokrasi Barat itu tetap saja sebagai budaya yang tidak tepat bagi Asia, seraya masih membenarkan kendali “kedikatoran developmentalis” seraya menggunakan istilah *Asian values* untuk masih melakukan pelanggaran hak asasi—dari sisi pandang Barat.

J.H. Liu *et al* (2002) juga menegaskan penilaian itu, bahwa representasi pemimpin historis di Asia cenderung hegemonik atau konsensus. Namun akibat ‘kendali itu menghasilkan rendahnya tingkat konflik di seluruh etnis dan kebangsaan—yang barangkali juga semu sebagaimana halnya di Indonesia, keragaman dan toleransi tidak terjadi secara natural dari dalam komunitas. Kendali ‘represi’ itu secara spesifik di Malaysia dan Singapura dipandang telah membawa hasil nyata. Kedua negeri mencapai kemajuan dan kesejahteraan di satu sisi, meski pada sisi lain juga telah berhasil menggunakan ‘otoritarianisme-lunak’ dalam ‘mengendalikan’ kebebasan sipil—tidak dilanggar secara terbuka. Tapi dalam kondisi seperti itulah sesungguhnya ‘nilai-nilai Asia’ dalam formasi kemelayuan, Tionghoa dan beragam ras lainnya bisa tumbuh secara agresif. Itulah sebuah pilihan khas Asia sebagai upaya negara untuk mencapai kemakmuran *Serumpun* yang berpendidikan baik. W. F. Case (1996) menyebut perkembangan budaya demokrasi di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sebagai bangsa yang memilih jalan ‘semidemokratik’. Para pemegang kekuasaan di kawasan ini mengadopsi sebuah sistem kendali yang dirasakan paling stabil dalam mengelola negara sesuai dengan identitas dan karakter bangsa.

Apa yang disebut ‘nilai-nilai Asia’ barangkali sudah menjadi fakta dan memang ada benarnya. Dalam konteks Asia atau dunia Timur, bagaimana pun aspek kultural menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi komunitas dan kebersamaan kelompok. Tu Wei-ming (1991), misalnya merujuk pentingnya fitur kondisi manusia—etnisitas (*ethnicity*), bahasa ibu (*mother tongue*), semayaman leluhur (*ancestral home*), gender, kelas, dan religiusitas—untuk memahami kehidupan masyarakat. Fitur ini tetap relevan bagi

tahapan masyarakat berkembang dan modern Asia. Bangsa yang senantiasa mencari akarnya, di tengah perubahan lingkungan dan kesadaran global yang meningkat. Bahkan jika ada jalur alternatif untuk pertumbuhan kesejahteraan, maka demokrasi, teknologi, dan sekaligus modernisasi sesungguhnya bisa menumbuhkan dan memelihara formasi keragaman budaya yang ada.

Nilai-nilai Asia (*Asian values*) sebagaimana ditumbuhkan di Indonesia turut mewarnai identitas bangsa. Bahwa Indonesia mengembangkan demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai adat-tradisi (*indigenous values*). Pembentukan karakter dan identitas yang menekankan musyawarah (*deliberation*) daripada berhadapan dan bertentangan sebagai oposisi untuk mencapai mufakat (*consensus*). Pengendalian seperti itu, menurut M.R. Thompson (2001), menjadi pilihan beberapa rezim lama di Asia Tenggara, diklaim sebagai sebuah sistem politik yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas yang pada gilirannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Identitas Melayu Asia Tenggara. Secara virtual terlihat bahwa pada situs-situs resmi pemerintah dan kalangan menengah atas warga mengekspresikan tampilan fisik yang relatif sama dengan kebanyakan etnis lain. Bahkan untuk busana resmi kegiatan politisi, pebisnis, dan kalangan terpelajar menggunakan busana gaya Barat, bukan pakaian adat. Identitas “Kemelayuan” menurut Shamsul A.B. (2001), terdiri atas tiga pilar yakni bahasa, kesultanan, dan agama. Ketiganya dipelihara dan dikembangkan secara institusional mulai pada masa kolonial. Konstruksi lembaga dikembangkan sebagaimana pemikiran independensi yang berkembang dengan memunculkan gagasan modern “ras Melayu” dan “bangsa Melayu” yang diekspresikan dan tercermin dalam gerakan nasionalis anti-kolonialisme. Muncullah perjuangan dari para elite Melayu untuk membentuk suatu identitas baru mengenai kemelayuan pasca-kolonial. Pertama, dengan memperkenalkan istilah bumiputera yang memperluas ruang lingkup dan makna “Malayness” dalam rangka rekayasa sosial ekonomi dengan program Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*, NEP) pada 1971-1990. Selanjutnya, kebijakan ini dengan sendirinya mengikis tiga pilar Kemelayuan untuk mau tidak mau harus mengembangkan keberagaman yang telah menjadi realitas.

Sebutan identitas melayu di Indonesia pemaknaannya menyempit, tidak seluas makna Nusantara dari Sabang hingga ke Merauke, meskipun yang dimaksud sama. J. Forshee (2006:12) misalnya menyarankan cara memandang identitas Indonesia itu secara menyeluruh. Mulai dari komunitas yang tinggal di daerah terpencil, hidup sebagai pemburu dan pengumpul, petani-petani berpindah dan menetap, nelayan, pengrajin di desa-desa (*rural*), pekerja pabrik di pinggiran kota (*suburban*), pekerja kantoran di perkotaan (*urban*), kaum intelektual, komunitas seniman, industrialis kaya, pedagang kaki lima, hingga para tunawisma di metropolitan. Kultur itu melibatkan warga desa dalam bentuk masyarakat adat, kaum urban dan cosmopolitan yang canggih, serta orang-orang yang berjuang untuk sekadar bertahan hidup di jalanan kota sebagai pengemis, pedagang asongan, pelacur, ojek motor dan ojek sepeda, dan tukang becak.

Harus diakui bahwa ragam identitas etnis Nusantara memiliki sistem kepercayaan yang luar biasa, materi kebudayaan, dan ragam seni yang menghiasai ribuan pulau. Selain itu sejumlah warisan candi megah (*majestic temples*), ragam karya sastra, pertunjukan panggung dan teater, kekayaan cerita mitos, ajaran dan petuah, dan seni visual yang indah telah ditanam dan tumbuh di Nusantara selama berabad-abad hingga kini. Pada abad ke-7, orang-orang menciptakan perhiasan emas indah, pahatan dan ukiran batu dan kayu yang detil dan rumit, karya tekstil indah dan begitu rumit. Inilah hasil karya seni yang jenius yang terus-menerus dikembangkan dan ditafsirkan-ulang dan disari-murnikan pada era modern. Keunikan itu, kata Forshee (2006:24) lebih kuat lagi karena saling terangkai secara historis melalui pengalaman politik yang panjang, perdagangan, konflik dan perang, kolonialisme, dan proses pembentukan Republik Indonesia. Namun tetap bahwa masing-masing pulau itu berbeda. Perbedaan sosial, agama, atau geografis yang luar biasa muncul dalam pulau besar seperti Sumatra atau bahkan sekecil Sawu sekali pun.

Berkaitan dengan ragam etnis di Indonesia, banyak kalangan menilai bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam keseluruhan ciri-ciri budaya antara Jawa (dan mungkin orang Bali juga) di satu sisi, dan beberapa kelompok etnis besar di Sumatra, daerah pesisir Borneo, dan Sulawesi, di sisi lain. T. Sekimoto (1988) mengamati dan menilai bahwa mereka cenderung

melihat kelompok Jawa Barat dan lainnya tadi dalam skema dikotomis, dan menekankan keunikan tradisi Jawa yang bersumber dari kerajaan dengan detail budaya yang sangat dipengaruhi oleh tradisi India sebelum Islam. Hal ini juga menunjukkan impresi yang sedikit berlebihan, bahwa orang Jawa lebih dikedepankan dalam jaringan kompleks hirarki pemerintahan. Diidentikkan lebih akomodatif terhadap tindakan-tindakan kolektif, dan lebih taat kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat dari kelompok etnis lain dinilai kurang erat terikat untuk tatanan kolektif, lebih egaliter, lebih ekspresif, dan lebih menekankan pada kekuatan individu dalam komunitasnya. Karakteristik ini tentu sangat erat dengan Melayu.

Ras adalah elemen akar dalam politik Melayu Serawak dan Borneo saat ini. Keragaman etnik cukup meluas, namun perbedaan penting terletak antara lain dalam hal (C.P. Bradley, 1968): 1) penduduk asli (pedalaman) yang tersisihkan, minoritas dikristenkan oleh misionaris Barat, 2) Melayu Muslim dan pribumi agama Islam, kadang-kadang dikenal sebagai "para-Melayu", dan 3) Tionghoa asal leluhur imigran. Secara teknis, dua kategori yang pertama dianggap asli (*native*) dan mereka menikmati status konstitusional istimewa. Meskipun Tionghoa Borneo saat ini lahir dan besar di lokal Borneo, namun sebagian besar generasi tuanya menyandang status elemen asing dengan loyalitas ambivalen, bagian dari Borneo, bagian tanah air (*homeland*) China, dan dalam berbagai derajat turut menjadi bagian dari komunitas Chinese.

Identitas etnis secara spesifik di Borneo, yakni Dayak misalnya, secara politis dan ekonomi terpecah-pecah. Ada disparitas baik di Sarawak maupun di Kalimantan, apa yang kini disebut sebagai 'Dayakism' sebagai suatu label internal. Hingga menjelang kedatangan kolonial, etnis-etnis pulau ini mengalami masa peperangan yang panjang antar kelompok. D. Lumenta (2005:35) menggambarkan komunitas etnis Dayak mengalami proses pengelompokan sosial dengan spasial pemukiman berbentuk rumah-rumah panjang di daerah aliran sungai. Mereka berkomunikasi dengan dialek beragam namun relatif sama.

Identitas Tionghoa Asia Tenggara.

Semua situs dan blog memperlihatkan representasi etnis Tionghoa secara ekspresif. Tidak saja dari sisi tampilan fisik seperti fisik orang-orang, namun

juga atribut lainnya seperti permainan, busana, makanan, dan bahasa. Representasi itu menunjukkan suasana kebebasan yang melegakan di kalangan etnis Tionghoa. Sebab, penerimaan orang-orang Melayu terhadap kultur Tionghoa sesungguhnya tanpa resistansi. Kecuali atas alasan-alasan politis yang direkayasa beberapa rezim, sebagaimana zaman prareformasi di Indonesia. Setelah terlepas dari kekangan politis, maka budaya etnis Chinese ternyata begitu antusias disandangkan, baik secara seremonial maupun kehidupan sehari-hari di semua lapisan dan ragam masyarakat. Identitas Tionghoa bahkan oleh negara disahkan secara formal sebagai bagian tak terpisahkan dari keragaman budaya Indonesia. Secara mikro, memang diakui bahwa bangkitnya kesadaran budaya Tionghoa juga disebabkan oleh ikatan primordial. Temali ini didefinisikan sebagai etnis, teritorial, bahasa, dan etika-agama terutama dalam konteks semakin kuatnya jejaring sosial hingga dalam lingkup komunitas Asia. Meskipun sering dicatat sebagai makna budaya daripada soal etnisitas, seperti pendapat Tu Wei-ming (1991), fitur menonjol dalam mendefinisikan Ketionghoan (*Chineseness*) adalah China yang berbudaya dan beradab, sebagaimana mitos yang diwariskan dan diklaim para leluhur.

Kebijakan negara berpengaruh signifikan dalam menumbuhkan iklim kondusif bagi terpeliharanya identitas budaya beragam etnis. Di Malaysia, etnis Chinese misalnya, memiliki identitas yang paling kuat di Asia Tenggara, diikuti Chinese di Singapura. Temuan J.H. Liu *et al* (2002) memperlihatkan bahwa dalam identitas nasional, etnis lebih sensitif di Malaysia disbanding di Singapura. Sense nasionalitas dan identitas etnis tadi juga menunjukkan korelasi positif, di mana identitas etnis ternyata lebih kuat daripada identitas nasional di antara warga Malaysia, diikuti etnis Melayu Malaysia. Lee K.H. dalam L. Suryadinata (1997:80) memberi alasan kuatnya identitas Tionghoa Malaysia tak lepas dari visi dan kebijakan PM Mahathir untuk membangun Wawasan 2020 mengenai *united society* dalam suatu *a truly bangsa Malaysia*—pertama kali digagas dalam pertemuan *Malaysian Business Council* 1991. 'Bangsa' itu harus membangun rasa percaya diri, demokratik, liberal, toleran, kepedulian, dan menanamkan moral dan nilai-nilai etika yang kuat.

Iklim mungkin jadi kebalikan di Indonesia, proses asimilasi yang terjadi menuju multikulturalisme dan hibriditas merupakan suatu

dilema bagi etnis Tionghoa, terutama pasca jatuhnya Soeharto. Wacana dominan dalam mengkomodaskan etnis Tionghoa di Indonesia selama rezim Soeharto adalah soal asimilasi, yang secara tegas bertujuan untuk menyerap minoritas ke dalam integrasi nasional. Namun, sebagaimana Chang Y.H. (2006) amati, 'diskriminasi resmi' terus-menerus mendera etnis Tionghoa, sehingga menempatkan mereka pada posisi paradoks yang jadi sasaran empuk permusuhan rasial dan kelas sosial pada Mei 1998. Kerusuhan sejenis sepanjang periode Orde Baru dan awal periode reformasi membuktikan kegagalan kebijakan asimilasi itu dan tanpa bangunan institusionalisasi yang kokoh dan adil. Namun sejak masa reformasi dipandang cukup memadai sebagai sebuah pendekatan yang lebih disukai untuk membangun kembali bangsa, sebagai bentuk konsistensi atas motto nasional Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*).

Pada sisi lain, bersinarnya bisnis keluarga Tionghoa di kawasan Asia Tenggara adalah bagian dari identitas yang tak terpisahkan. Inilah yang jadi bagian dari 'Overseas Chinese Diaspora' yang bertebaran di Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan, pada tingkat lebih rendah, di Filipina. Diaspora sebagai etnis yang unggul dalam kewirausahaan ini, oleh Lim dan Gosling (1983) dalam H. Wai-Chung Y. (1997) terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun perlu dicatat, bahwa bisnis etnis Tionghoa pada umumnya bukanlah perusahaan yang sama seperti para pendahulu mereka beberapa dekade lalu. Pada era kontemporer ini perusahaan lebih sebagai bagian investasi tanpa kenal batas, melintas cepat antarburza regional. Kini pebisnis lapis generasi kedua atau ketiga menerapkan manajemen modern seiring dukungan institusi pendidikan yang kualitasnya memadai di kawasan—bidang pendidikan yang juga diwariskan kepada generasi baru saat ini.

Realitas karakter bahasa

Representasi bahasa sebagai identitas etnis Melayu dan Tionghoa cukup menonjol secara virtual, meskipun beberapa situs menggunakan Bahasa Inggris, namun juga memiliki versi bahasa Melayu atau Indonesia, atau tulisan China. Tentu saja ekspresi ini sesuai dengan jejak di realitas sosial sehari-hari. Jika dirunut historikalnya, bahwa bahasa Melayu sejak awal abad ke-18 mulai dideskripsi melekat dengan pengenalan sejarah

Melayu. Bahasa itu menyebar ke wilayah yang luas sebagai alat komunikasi berabad-abad kemudian. A. Teew (1959) mencatat, bahwa generasi ulama Melayu begitu setia mencatat tugas mereka untuk memberikan enumerasi dari bahasa asing yang telah memberi kontribusi terhadap pengayaan kosakata Melayu. Banyak contoh kata-kata serapan dari berbagai bahasa. Namun di balik itu sejarah Melayulah yang memberikan ruang gerak dan sense tinggi bagi perkembangan bahasa. Asal-usul kata dan bahasa, perubahan secara evolutif dalam berbagai ragam bentuknya diperkaya dengan karya sastra pujangga-ulama itu. Di antara beberapa komunitas etnis, bahasa Melayu terpelihara dalam perjalanan sejarah ras ini, berperan penting sebagai alat komunikasi (termasuk dalam interaksi dan transaksi beragam komunitas sub-Melayu). Hal ini penting karena dalam sebaran wilayah yang semakin meluas di kawasan saat itu, hampir sepenuhnya belum dipetakan.

Keberadaan bahasa nasional di negara-negara kawasan Asia Tenggara telah menggantikan bahasa kolonial yang tadinya menjadi medium utama bahasa resmi pengajaran di sekolah-sekolah, pemerintah, dan bisnis. Bahkan untuk kasus Indonesia misalnya, bahasa Belanda sudah tidak berbekas kecuali pada kelompok generasi tua yang praktis sudah turun panggung, atau pada pengajaran studi hukum dengan kurikulum yang tetap berporos pada warisan kolonial Belanda. Pada generasi mudanya justru terlihat kecenderungan antusias luar biasa untuk mempelajari bahasa China, Jepang, dan Korea sebagai bahasa asing kedua setelah English. Kesadaran untuk mempelajari budaya Asia jauh lebih tinggi, apalagi di tengah isu kontemporer perdagangan bebas ASEAN-China saat ini.

Menurut J.A. MacDougall & Chew S.F. (1976), semua kecenderungan itu sebenarnya buah dari kebijakan pemerintah. Bahasa Belanda, English atau bahasa daerah Jawa memiliki potensi pemersatu yang bisa ditampilkan secara historis ke dalam Bahasa Indonesia. Di negara-negara lain seperti Malaysia justru mengalami masa transisi yang telah menimbulkan banyak kontroversi. Bahasa Inggris berkembang di sekolah-sekolah namun sejak kemerdekaan telah dibongkar secara sistematis untuk mendukung pertumbuhan budaya yang diarahkan untuk menggunakan medium Melayu. Namun situasi itu "memukul" Bahasa Melayu sendiri yang akhirnya campur-aduk tanpa kaidah serapan yang benar. Demikian juga di

Singapura, semua bahasa dari etnis multikultural memperoleh kesempatan untuk berkembang selain Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional. Sebuah kebijakan yang luar biasa.

Menarik dijadikan contoh hasil temuan T. Sekimoto (1988) mengenai diaspora Melayu-Jawa di Malaysia, yakni “kampung Jawa” Sabak Bernam. Mayoritas warganya berasal dari Jawa, ketika leluhur mereka pertama kali bermigrasi ke Tanah Melayu (1910-1930) dari pelosok Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun turunan Jawa, etnis ini diklasifikasikan sebagai salah satu dari banyak sub-kelompok Melayu. ‘Orang Jawa’ di Sabak Bernam sekarang sepenuhnya berasimilasi dengan bangsa Malaysia, mendiami di hampir seluruh daerah tersebut, termasuk sejumlah pejabat pemerintah dan pegawai negerinya. Komunitas ini masih berbahasa Jawa sebagai bahasa ibu, kecuali generasi sepuh, semuanya *bilingual*, berbicara Melayu Malaysia dengan sangat lancar, berbagi aksentuasi lokal bersama Melayu lokal lainnya yang non-Jawa. “Melayu-Jawa” Sabak Bernam bukanlah minoritas yang bermigrasi ke lingkungan sepi dan terisolir, tapi sudah dihuni oleh warga tempatan. Selanjutnya mereka melebur jadi Melayu Malaysia tanpa banyak kesulitan dalam proses asimilasi alami. Fakta bahwa diaspora komunitas etnis itu telah menginkluskikan diri ke dalam institusi sosial nasional beserta atributnya.

Identitas religius moderat

Representasi Melayu secara virtual sangat kuat dengan identitas Muslim, sebagaimana realitas di lapangan. Diskursus mengenai karakter religiusitas ini tak lepas dari pengakuan dunia sebagai Muslim moderat. Predikat itu sangat penting dikomunikasikan kepada dunia, termasuk secara virtual. Sebab, selama ini negeri-negeri Muslim semakin kuat menerima *stereotyping* dari warga dunia, dicap sebagai Muslim radikal atau bahkan negeri teroris. Kawasan Asia Tenggara menyadari itu, sehingga pilihan yang mengedepankan Muslim moderat sangat penting dipahami sebagai bagian dari identitas yang tak terpisahkan dari nilai-nilai Asia.

Jika ditelaah dalam kajian budaya, identitas Melayu tak terpisahkan dengan peran Islam di kawasan. Bahkan jauh menembus kepada persoalan eksistensi sosial-politik. O. Abdullah (2002:39), melihat hal yang krusial dalam mendefinisikan masa depan politik, yakni soal relasi antara kekuatan Islamis dan pembangunan

sistem politik demokrasi. Pemerintah dan para pemimpin politik, dengan begitu, berupaya berjalan seimbang pada garis yang memberi respon sentimen populer—guna meraih partisipasi politis dari Muslim—sementara mengkomodifikasi geliat pergerakan ini. Ekspresi Islam terbentuk untuk menghadapi kekuasaan dan mendukung elemen lain, atau sebagai bagian dari pemerintahan yang menentukan sistem perpolitikan. Esposito, sebagaimana dikutip O. Abdullah (2002:19) menyebutkan empat bentuk peran itu, yakni: 1) oposisi yang revolusioner terhadap sistem politik, 2) oposisi yang bekerjasama dengan sistem politik, 3) partisipasi aktif dalam pemerintahan dalam koalisi antarkekuatan politik lainnya, dan 4) mengendalikannya kekuasaan dalam sistem politik.

Soal militansi Islam, sesungguhnya komunitas Serumpun di Kawasan Asia Tenggara berbeda dengan kawasan Timur Tengah. Bagi umat Islam Indonesia yang notabene “orang Melayu”, hampir seluruhnya menjalankan identitas sebagai Muslim moderat. Faktanya hingga masa reformasi di Indonesia misalnya, hanya sebagian kecil saja pendukung pembentukan rezim-rezim syariah secara lokal. Daerah-daerah menetapkan pilihan itu lebih sebagai identitas otonomi teritorial dan bentuk pengakuan politis, termasuk predikat keistimewaan di antara daerah lain. Sebab substansinya tetap sama sebagaimana ummat di daerah lain menjalankan ibadah di wilayah Republik Indonesia. Z. Abuza (2003:2) menjelaskan, sebagian besar penduduk Muslim di Asia Tenggara mendukung negara sekuler dan menjauhkan diri dari kekerasan—yang notabene hasil interpretasi keliru terhadap literasi Islam yang melanda ‘pejuang politik’ di Asia Selatan dan Timur Tengah. Di dua kawasan ini selalu ada militan, tetapi kebijaksanaan konvensi negara setempat menyatakan bahwa mereka hanya fokus pada agenda domestik belaka.

Islam mengakui hak kesetaraan manusia meskipun ada perbedaan warna, ras, kebangsaan atau budaya. Identitas Melayu sebagai Muslim tak terpisahkan dengan etnis Chinese jika dari sisi sejarah sesungguhnya China telah lebih dahulu mengadopsi ajaran Islam. J.F. Quinn dalam Long, Awang & Salleh (2004: 407) menyebut perkembangan religiusitas sufisme di China Barat dan Asia Tengah misalnya, sebagai konsep untuk bertoleransi. Sufisme yang melatih tasawuf banyak dipraktikkan di wilayah itu sebagai latihan praktis bagi jiwa dan pemahaman filosofis menuju

toleransi. Inilah penyeimbang dan preventasi radikalisme yang mengatasnamakan agama.

Pertumbuhan Islam di Kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari pusat pembelajaran generasi demi generasinya ke Timur Tengah. Jejak para wali dan sekian generasi berikutnya sangat kuat di Kepulauan Nusantara dan Semenanjung Melaka. Beberapa tokoh ulama yang berperan besar selain wali Sembilan yang dikenal di Tanah Jawa, adalah al-Palimbani, al-Banjari, dan al-Fatani. Mereka bertiga yang dikenal berasal dari dunia Melayu-Indonesia menjadi kohort para ulama Timur Tengah pada abad ke-18. A. Azra (2004) menjelaskan bagaimana hubungan temali keilmuan ini antara Timur Tengah dengan Melayu-Nusantara. Muslim Melayu mengeksplorasi transmisi pengetahuan Islam dari Timur Tengah ke dunia (Jawi) Melayu-Indonesia. Sebagai murid cemerlang di Timur Tengah tempatnya belajar, al-Palimbani dan al-Fatani akhirnya tak pernah kembali ke Tanah Air karena mengabdikan di sana. Mereka justru menarik murid-murid baru dari Melaka dan Nusantara untuk memulai pembenihan perjuangan melawan kolonial. Al-Banjari kembali ke Asia Tenggara bersama beberapa alumni lain, lantas meluncurkan reformasi kiblat dan sistem administrasi peradilan yang diaplikasikan hingga kini.

Peristiwa 11 September 2001 meninggalkan tanda tak terhapuskan di dunia. Termasuk spot-spot merah dalam peta dunia Melayu yang diindikasikan terhubung dengan aksi radikalisme. Serangan terhadap WTC di New York itu juga meninggalkan dampak abadi pada komunitas Muslim di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara. Sejak peristiwa itu, jelas S. Kadir (2004), umat Muslim dihadapkan dengan pertanyaan baru tentang agama dan hubungannya kepada negara. Respon negara setelah berbagai peristiwa itu memasuki proses yang rumit dengan mengarahkan kebijakan negara ke arah tunggal dan terkendali. Kecenderungan ini memaksa politik Muslim tertekan dan mungkin malah jauh dari tujuan meredakan kekerasan global.

Karena itu diyakini bahwa ada pengaruh eksternal dan internal yang berkontribusi bagi munculnya radikalisme Islam di Semenanjung Melaka, Kepulauan Nusantara, dan Filipina. Identitas kultural sebagai Muslim moderat yang hanya dimiliki Asia Tenggara terus tergerus dengan munculnya berbagai aksi tindak kekerasan yang berlatar atau mengatasnamakan agama.

Barangkali bisa dipahami bahwa perilaku bias identitas orisinal itu sebagai respon terhadap penyusupan budaya Barat dan atau karena kesadaran tinggi ummat dengan menemukan ekspresi politik identitas mereka. A.M. Rabasa (2003), misalnya mengamati selain adanya polarisasi sekelompok kecil radikal juga karena terbentuknya jaringan transnasional yang menghubungkan kelompok-kelompok militant radikal akibat revolusi Iran, perang Afghanistan dan perbatasannya dengan Pakistan, kekecewaan atas tidak adanya kemajuan dalam menyelesaikan masalah Palestina, dan letusan konflik etnis yang melibatkan warga Muslim di berbagai bidang seperti Bosnia, Chechnya, dan Kashmir. Sentimen ketidakadilan itu cepat tersulut akibat media global.

Satu bukti menguatnya kekangan sentral negara atas identitas budaya warganya adalah isu-isu pelarangan busana yang jadi bagian dari identitas itu, jilbab. Hal ini tidak saja pernah terjadi di Indonesia—negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia—juga di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ketika ‘krisis jilbab’ terjadi di Thailand terjadi misalnya, Kam-Yee Law (2003) memandangnya sebagai upaya minoritas Muslim di bagian selatan negeri itu berusaha untuk memperoleh pengakuan (*recognition*) atau ‘moment of legitimacy’ di suatu negara di mana agama Buddha adalah agama nasional. Pelarangan atau sengketa tudung di Singapura tentu saja memiliki signifikansi lebih besar, karena jarang orangtua-orangtua siswa turun dalam unjuk pembangkangan sipil di negara yang dikenal karena otoritarianisme dan paternalisme. Selain pentingnya berjuang untuk kebebasan beragama, tindakan warga telah membuat situasi canggung berkaitan kekerabatan antara Melayu Muslim di Malaysia dan Muslim Singapore—yang telah terpinggirkan dalam kurun waktu yang lama dalam proses mobilitas sosial dan integrasi etnis. Sejak krisis ekonomi, dan dalam konteks pengaturan domestik dan internasional pasca-9/11, insiden jilbab menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pengakuan atas identitas dan keintegrasian di kawasan secara lebih luas.

Sesungguhnya rasisme itu jauh dari kehidupan sehari-hari orang Asia, karena mereka merupakan masyarakat yang multicultural yang justru mengedepankan toleransi rasial sebagai bagian dari ideologi. Menurut M.D. Barr (1999), dalam masyarakat kontemporer multikultural

Singapore, misalnya, seseorang ditekankan untuk memiliki kesadaran tinggi mengenai ras dalam rangka membangun toleransi. Diskriminasi dan keminoritasn Melayu di Singapura muncul dalam wacana di situs virtual.

Meskipun nuansa Islam Melayu Malaysia dan Brunei Darussalam lebih kaku dibandingkan dengan perkembangan sipil di Indonesia, namun ketiga negeri jiran ini mengalami perkembangan keislaman secara gradual. Ada banyak kesamaan identitas dalam religiusitas yang harus dipelajari untuk mengedepankan moderasi, Islam yang membawa rahmat bagi manusia dan kebaikan alam. Memang, ada berbagai model trial and error dilakukan, baik itu dengan langsung menerapkan hukum syariah maupun secara bertahap, keduanya memperlihatkan semangat transformasi yang terinspirasi dari paham Wahabi pada era akhir 1970-an ke dalam diskursus baru masyarakat sipil Islam melalui kelas menengah baru di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kata Jan Stark (2004), bahwa Islam-Wahabi ("Arabism") masih tetap dicermati karena berpengaruh penting bagi bentuk masa depan politik Islam di kawasan ini. Akhirnya, potret masa depan Asia Tenggara tidak bisa dianggap remeh dari wajah Islam. Karena itu komunitas Muslim Asia Tenggara harus menampilkan identitas karakter sejatinya: Muslim moderat.

Kesimpulan

Situs-situs, blog, dan jejaring sosial masih langka untuk mengangkat kekhasan etnis Melayu dan Tionghoa. Ini terbukti dengan pencarian menggunakan mesin pencari Google. Selanjutnya, representasi virtual kedua etnis ternyata belum menampilkan seluruh karakteristik identitas etnis secara lengkap baik tampilan fisik, bahasa, pakaian, maupun *cuisine*. Situs resmi pemerintah memperlihatkan kurang dominannya representasi karakteristik Melayu dan Tionghoa, namun lebih bernuansa visual ala Barat, sedikit berbeda dengan situs nonpemerintah. Bahkan keduanya masih miskin kedalaman konten. Keberadaan diaspora Serumpun Melayu dan Tionghoa di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dimaknai dalam konteks akar persoalan komunitas sebagai realitas sosial. Secara keseluruhan, keberadaan kedua rumpun etnis wujud hasil pergulatan dalam memperjuangkan kesetaraan, independensi, kepentingan sosial-politik, dan budaya terhadap dominasi kekuatan kolonial, pascakolonial dan global. Identitas bahasa Melayu

(Indonesia) ditampilkan dengan representatif, meskipun ada versi English. Namun dalam keseharian bahasa Melayu telah berkembang dengan banyaknya serapan tanpa kaidah yang benar dalam berkomunikasi. Representasi religiusitas kedua ras ditampilkan tapi tanpa pesan yang berkarakter. Bahwa Muslim Asia Tenggara kini tengah menghadapi tantangan global dari isu terorisme. Oleh karena itu representasi sebagai Muslim moderat mestinya cukup komunikatif ditampilkan dalam media baru Internet.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Othman bin, "Islam and Democracy: Reflecting the Role of Islam in Malaysia and Indonesia," *a thesis of Naval Postgraduate School, Monterey, CA*, March 2002, 99p.
- Abuza, Zachary (2003). *Militant Islam in Southeast Asia Crucible of Terror*. Boulder, CO: Lynne
- Anuar, Mustafa K. "Politics and the Media in Malaysia," in *Philippine Journal of Third Worlds Studies*, 2005, 20(1): 25-47.
- Azra, Ayzumardi (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press. 254 pp.
- Barr, Michael D. "Lee Kuan Yew: Race, Culture and Genes," in *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 29; 2, 1999: 145-166.
- Barrell, Ray & Pain, Nigel "Developments in East and Their Implications for the UK and Europe," *a paper of LINK Project* in Kuala Lumpur, September 1997.
- Boellstroff, Tom & Lindquist, Joan, "Bodies of Emotion: Rethinking Culture and Emotion through Southeast Asia," in *Ethnos*, Vol. 69:4, Dec, 2004:437-444.
- Bradley, C. Paul, "Communal Politics in Malaysian Borneo," in *The Western Political Quarterly*, Vol. 21; 1 (Mar., 1968): 123-140.
- Case, William F. "Can the 'Halfway House' Stand? Semidemocracy and Elite Theory in Three Southeast Asian Countries," in *Comparative Politics*, Vol. 28; 4 (July 1996), 437-464.

- Chang Yau Hoon, "Assimilation, Multiculturalism, Hybridity: the Dilemmas of Ethnic Chinese in Post-Suharto Indonesia," in *Asian Ethnicity*, 7(2), 149-166.
- Clammer, J.R. (2002). *Diaspora and Identity: The sociology of Culture in Southeast Asia*. Singapore: Pelanduk Publications, 339 pp.
- Ding Choo Ming, "Local Wisdom in Malay Manuscripts," in *Resonance*, Apr-Jun, 2009: 18-22.
- Forshee, Jill (2006). *Culture and Customs of Indonesia*. Westport, CT: Greenwood. 265 pp.
- Edward T. Hall dan Mildred Hall (1990). *Cultural Differences*. Yarmouth, Maine: Intercultural Press, Inc. 196 pp.
- Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, New Jersey, NJ: Princeton University Press. 311 pp.
- Heryanto, Ariel "Cultural Studies' Significant Others: The Case of Indonesia," in *International Cultural Studies Conference*, Trawas, Indonesia, 3-5 Feb. 2003.
- Hidayat, Z. "Dimensi Budaya dalam Perkembangan Disiplin Ilmu Komunikasi," in *Komunikasiologi Journal of Communication*, Fikom, UEU, Jakarta: Mar. 2011, 28 p.
- Hirschman, C. "The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An Analysis of census Classifications," in *Journal of Asian Studies*, Vol. 46, 3 (Aug., 1987): 555-582.
- Henry Wai-Cheung Yeung, "The Internationalization of Ethnic Chinese Business Firms from Southeast Asia," a paper of Blackwell Publishers Ltd 1999, Oxford, UK.
- Kadir, Suzaina "Mapping Muslim Politics in southeast Asia after September 11," in *The Pacific Review*, Vol. 17 No. 2 June 2004: 199-222.
- Kam-Yee Law "The Myth of Multiracialism in Post-9/11 Singapore: The Tudung Incident," in *New Zealand Journal of Asian Studies* 5, 1 (June, 2003): 51-71.
- Kingsbury, Damien "Constraints on Reporting Australia's Asian Neighbours, in *Asia Pacific Media Educator*, 2, 1997, 102-111.
- Lee, Wen-shu *et al.*, "A Sociohistorical Approach to Intercultural Communication", in *Howard Journal of Communications*, Vol. 6, Issue 4, 1995: 262-291..
- Lee Kam Hing, "Malaysian Chinese: Seeking Identity in Wawasan 2020," in Leo Suryadinata (ed.), *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore: ISAS. 308 pp.
- Lian Kwen Fee, "The Construction of Malay Identity across Nations Malaysia, Singapore, and Indonesia," in *Land- en Volkenkunde* 157 (2001), No. 4, Leiden, 861-879.
- Liu, James H. *et al.*, "Social Representations of History in Malaysia and Singapore.." in *Asian Journal of Social Psychology* (2002) 5:3-20.
- Lumenta, D. "State Boundaries & Ethnic Identity: A Case Study On Iban-Kenyah.." in *Economic Prospects Cultural Encounters, & Political Decisions*, API Fellows, 2005:1-18.
- Long, Ahmad Sunawari *et al.* "Islam: Past, Present and Future," in *Proceedings of International Seminar on Islamic Thoughts*, 7-9 Kuala Lumpur, Dec., 2004. 1178 pp.
- MacDougall, John A. & Chew Sock Foon (1976), "English Language Competence and Occupational Mobility in Singapore," in *Pacific Affairs*; 49; 2 (Summer, 1976): 294-312.
- Manovich, Lev (2001). *The Language of New Media*. Cambridge, Massachusetts, the MIT Press. 202 pp.

- Markus, H.R. & Kitayama, Shinobu, "A Collective Fear of the Collective: Implications for Selves and Theories of Selves," in *PSPB*, Vol. 20 No. 5, Oct. 1994: 568-79.
- Nor, Nora Mohamed, "An Islamic Reading of Moral Issues in Malay Novels," a *thesis* of Universiti Putra Malaysia. 2006. Pp. 25.
- Parnickel, B. "The Relations between Ethnic Groups in Malaysia and Their Reflection in Contemporary Malay Prose," in *Land-en Volkenkunde* 135; 1979; Leiden, 282-299.
- Rabasa, Angel M. (2003). *Political Islam in southeast Asia: Moderates, Radicals and Terrorists*. London: Oxford University. 82 pp.
- Roy, Denny, "Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagoning?" in *Contemporary Southeast Asia* 27, No. 2 (2005): 305-22.
- Rozaan, M.Z. Abd & Mikami, Yoshiki, "Orthographic Reforms of Standard Malay Online..." in *Journal of Universal Language* 8, March 2007, 129-159.
- Sani, M.Z. Mohd & Hara, A.B. Eby, "Deliberative Democracy in Malaysia and Indonesia: A Comparison," a *paper of Faculty of International Studies*, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia. 21p.
- Schwartz, Shalom H. "A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work," in *Applied Psychology: An International Review*, 1999, 48(1), 23-47.
- Sekimoto, Teruo, "A Preliminary Report on the Javanese in Selangor, Malaysia," in *Southeast Asian Studies*, Vol. 26, No. 2, September 1988, 175-190.
- Shamsul A.B. "A History of an Identity, an Identity of a History..," in *Journal of Southeast Asian Studies*, 32(3): 355-366 Oct., 2001.
- Stark, Jan, "Contesting Models of Islamic Governance in Malaysia and Indonesia," in *Global Change, Peace & Security*, Volume 16, Number 1, June 2004, 115-131.
- Suryadinata, Leo (ed.) (1997). *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 308 pp.
- Suryadinata, Leo, "Ethnic Chinese in Southeast Asia and Their Economic Role," in *Chinese Populations in Contemporary Southeast Asian Societies: Identities..*, Armstrong, M.J *et al.* (eds.), 2001, Routledge, 268 pp.
- Taylor, K.W. "The Early Kingdoms", in Nicholas Tarling (ed.), *The Cambridge History of Southeast Asia*, Vol. 1, pp. 137-82, Cambridge University Press.
- Teeuw, A. "The History of the Malay Language: A Preliminary Survey," in *Bijdragen de Taal-, Land- en Volkenkunde* 115 (1959), No. 2, Leiden, 138-156.
- Thompson, Mark R. "Whatever Happened to 'Asian Values'", in *Journal of Democracy*, Volume 12, Number 4, October 2001, pp. 154-165.
- Tirtosudarmo, Riwanto, "The *Orang Melayu* and *Orang Jawa* in the 'Lands Below the Winds'", in *CRISE Working Paper 14*, University of Oxford. March 2005. Pp. 19.
- Tu Wei-ming, "Cultural China: The Periphery as the Center," in *Daedalus*; Spring 1991; 120, 2; 1-32.
- Woodier, Jonathan (2008). *Southeast Asia: Karaoke Culture and the Evolution of Personality Politics*. Northampton, MA: Edward Elgar. Pp. 377.
- Yoshihara, Kunio, "The Comparative Economic Performance of Malaysia: An Analysis," in *Southeast Asian Studies*, Vol. 42, No. 1, June 2004.

Lampiran



Ki-ka, atas: Situs Melayu Indonesia, situs Tionghoa Indonesia, situs Melayu Malaysia; **tengah:** Situs Tionghoa Malaysia, situs Melayu Singapore, situs blog Tionghoa Singapore; **bawah:** situs Melayu Brunei Darussalam; Situs Tionghoa Brunei Darussalam, dan Facebook Persatuan Melayu Serumpun.